



*Jurnal Penelitian*

# POLITIK

Vol.17, No.1, Juni 2020

## PERANG DAN DAMAI: SITUASI POLITIK DI ERA KETIDAKPASTIAN

- Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran  
Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik
- Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War
- Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan
- Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan
- Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989-2018
- Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional
- Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional

### REVIEW BUKU

- Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 17	No. 1	Hlm. 1-158	Jakarta, Juni 2020	ISSN 1829-8001
---------------------------	---------	-------	------------	--------------------	----------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Prof. Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Siswanto (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, M.A (*Ahli Gender dan Politik*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Politik Internasional dan Keamanan*)  
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dr. Alfitra Salam (*Ahli Kajian Pemilu dan Demokrasi*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)  
Dr. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Hayati Nufus, S.Hum., LL.M

**Dewan Redaksi**

Dr. Sri Nuryanti (*Ahli Kajian Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Dhurorudin Mashad (*Ahli Kajian Islam dan Timur Tengah*)  
M. Nurhasim, S. IP, M. Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Awani Irewati, M.A (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Sandy Nur Ikfal R, M.Si(Han) (*Ahli Kajian Hubungan Internasional dan Perbatasan*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Esty Ekawati, M.IP.  
Tri Rainny Syafarani, S.Sos, M.A., M.SE  
Sutan Sorik, S.H.  
Putri Ariza Kristimanta, M.Si.(Han)

**Layouter  
Produksi dan Sirkulasi  
Alamat Redaksi**

Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi  
Adiyatnika, S.Kom  
Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com  
Website: www.politik.lipi.go.id | http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476  
Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

## DAFTAR ISI

Daftar Isi		i–ii
Catatan Redaksi		iii–iv
Artikel		
	• <b>Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik</b>	1–16
	<i>Alfin Febrian Basundoro</i>	
	• <b>Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War</b>	17–30
	<i>M. Hamdan Basyar</i>	
	• <b>Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan</b>	31–58
	<i>Petrus Kanisius Siga Tage</i>	
	• <b>Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan</b>	59–78
	<i>M. Bahtiar Fajri</i>	
	• <b>Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989-2018</b>	79–102
	<i>Putri Ariza Kristimanta</i>	
	• <b>Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional</b>	103–116
	<i>Khanisa dan Lidya Christin Sinaga</i>	
	• <b>Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional</b>	117–140
	<i>Indriana Kartini, Awani Irewati, Agus R. Rahman, Tri Nuke Pudjiastuti, CPF Luhulima, Rosita Dewi, Sandy Nur Ikfal Raharjo, Hayati Nufus</i>	
Review Buku		
	• <b>Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global</b>	141–156
	<i>Defbry Margiansyah</i>	
Tentang Penulis		157–158

## CATATAN REDAKSI

Tahun 2020 dibuka dengan kekhawatiran akan pecahnya perang dunia ketiga akibat ketegangan politik global yang kian memanas. Serangan udara Amerika Serikat yang menewaskan Mayor Jenderal Iran Qassem Soleimani memperburuk ketegangan politik di Timur Tengah. Ketegangan di wilayah ini memiliki dampak yang lebih luas dan berpotensi menjadi ancaman bagi pasokan minyak global mengingat negara produsen minyak dunia berada di wilayah konflik ini.

Di sisi lain, meningkatnya ketegangan politik global juga disebabkan oleh persaingan dua kekuatan besar, yaitu Amerika dan Tiongkok. Perang dagang di antara dua negara ini berdampak pada perekonomian dunia. Selain itu, unjuk kekuatan militer kedua negara di wilayah Laut China Selatan juga menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan Asia tenggara. Persaingan antara Amerika dan Tiongkok ini semakin meningkatkan ketidakpastian politik global. Latar belakang kondisi politik internasional di atas mendorong redaksi untuk mengangkat judul “Perang dan Damai: Situasi Politik di Era Ketidakpastian” sebagai tema dalam terbitan *Jurnal Penelitian Politik* Volume 17, No. 1 Tahun 2020. Edisi kali ini menyajikan delapan tulisan yang terdiri dari tujuh artikel ilmiah dan satu naskah review buku.

Artikel pertama berjudul “**Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi – Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik**” mengulas tentang dinamika permainan kekuatan di antara dua aktor kunci dalam konflik di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran. Dalam memenuhi kepentingannya, kedua negara terlibat dalam perang proksi yang juga melibatkan negara-negara sekutu masing-masing. Dalam tulisan ini Alfin Febrian Basundoro menganalisis strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Iran dalam turbulensi yang terjadi di kawasan tersebut.

Artikel kedua yang ditulis oleh M. Hamdan Basyar berjudul “**Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War**”. Tulisan ini memaparkan tahapan-tahapan dan etika perang dalam ajaran Islam. Selain itu, tulisan ini juga menyandingkan pembahasan etika perang dalam Islam dengan teori *just war* untuk lebih memahami makna jihad dan aturan-aturan dalam Islam terkait dengan perang. Melalui analisisnya penulis menemukan bahwa gagasan diskriminasi kombatan dan non-kombatan dalam Islam tidak setara dengan prinsip modern kekebalan non-kombatan.

Dalam artikel ketiga yang berjudul “**Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan**” dibahas mengenai politik kebijakan anggaran kesehatan di era ketidakpastian. Pertus Kanisius Siga Tage melalui tulisannya mengungkapkan bahwa dalam situasi yang semakin rumit di era ketidakpastiaan, kebijakan terkait anggaran di beberapa negara justru mengabaikan sektor pembiayaan kesehatan dan lebih fokus pada sektor militer dan perang. Politisasi anggaran kesehatan ini perlu dianggap sebagai langkah keliru yang bisa membahayakan peradaban manusia.

Sementara itu, artikel keempat yang ditulis oleh M. Bahtiar Fajri menganalisis tentang strategi pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika sengketa dan konflik di Laut China Selatan. Artikel berjudul “**Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan**” menunjukkan bahwa untuk menghadapi perang hibrida di kawasan Laut China Selatan, Indonesia perlu menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya.

Selain ancaman perang antarnegara, konflik pada level domestik juga turut menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan. Dalam tulisan berjudul “**Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989-2018**”

Putri Ariza Kristimanta mengelaborasi tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara pada rentang waktu 1989-2018. Tulisan ini memaparkan bahwa dalam rentang waktu tersebut jumlah konflik berbasis negara sedikit meningkat, sedangkan konflik non-negara dan kekerasan sepihak justru sedikit menurun. Selain itu, penulis juga mengelaborasi pemicu kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara dengan menggunakan Myanmar sebagai contoh.

Di tengah ketidakpastiaan politik global, Indonesia bercita-cita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, Indonesia perlu memastikan adanya lingkungan strategis yang damai dan stabil. Untuk itu, pembangunan lingkungan yang kondusif serta sinkronisasi antara visi Poros Maritim Dunia dan skema pembangunan maritim di tingkat ASEAN perlu diupayakan. Upaya Indonesia tersebut dipaparkan secara komprehensif oleh Khanisa dan Lidya C. Sinaga dalam artikel berjudul “**Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional**”.

Sinkronisasi tidak hanya diperlukan di antara Indonesia dengan ASEAN. Untuk mendukung pembangunan di wilayah ini, perlu sinergi di antara ASEAN dengan kerja sama ekonomi subregional yang ada di kawasan ini, terutama dalam mendorong pembangunan konektivitas fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat demi mendukung implementasi Komunitas ASEAN yang damai dan sejahtera. Dalam artikel ketujuh yang berjudul “**Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional**”, Indriana Kartini dan tim penulis menganalisis strategi pemanfaatan sinergi antara kerja sama ekonomi subregional dengan ASEAN untuk pembangunan konektivitas Indonesia, terutama di wilayah perbatasan.

Selain tujuh artikel di atas, penerbitan kali ini juga memuat review buku yang ditulis oleh Defbry Margiansyah dengan judul “**Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global**”. Ketidakpastian seringkali dilihat sebagai komponen difusi kekuasaan dalam

studi hubungan internasional. Buku karya Peter J. Katzenstein dan Lucia A. Seybert yang berjudul *Protean Power: Exploring the Uncertain and Unexpected in World Politics* melengkapi perspektif kekuasaan tersebut dalam menjelaskan dinamika politik global kontemporer. Dalam review buku ini Defbry juga mengkritisi analisis konseptual yang telah dilakukan oleh Katzenstein dan Seybert dengan merekonstruksi deskripsi konsep yang lebih operatif dalam menjelaskan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam politik global.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah berkontribusi hingga terbitnya *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini, khususnya para penulis, mitra bestari, dewan redaksi, dan tim pengelola jurnal. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya kajian mengenai dinamika keamanan dan politik internasional.

Selamat membaca.

**Redaksi**

# TREN DAN PEMICU KEKERASAN TERORGANISASI DI ASIA TENGGARA 1989 - 2018

## TRENDS AND DRIVERS OF ORGANIZED VIOLENCE IN SOUTHEAST ASIA 1989–2018

Putri Ariza Kristimanta

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav. 10, Jakarta  
E-mail: putr018@lipi.go.id

Diterima: 10 April 2020; direvisi: 28 April 2020; disetujui: 26 Juni 2020

### Abstract

*This research elaborates trends in organized violence in Southeast Asia between 1989 and 2018, using the primary dataset of the Uppsala Conflict Data Program (UCDP). In contrast to the significant increase in non-state conflict in global trends, the state-based conflict has slightly increased, while non-state conflict and one-sided violence have slightly decreased. In terms of conflict intensity, the number of fatalities remains high as a result of the Islamic State-Philippines war in Marawi, Mindanao in 2017. There are 186 state-based armed conflicts, 23 non-state conflicts, and 78 one-sided violence in Southeast Asia recorded in the dataset. The number of interstate and internationalized armed conflicts remains low, leaving the rest of the statistics to 183 intrastate armed conflicts in the sub-region. The contested territory is the major incompatibility with 135 intrastate armed conflict. This research also elaborates the drivers of organized violence, using Myanmar as an example. Being a country with seven decades of ethnic insurgency, Myanmar lead the statistic with 83 conflict, the highest number of intrastate armed conflict. Tension and overlapping interest between Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and ethnic armed organization are the main driver of insurgency. Then, there are three national-level drivers according to Myanmar context and complexity, namely (1) civil vs military tension; (2) identity; and (3) central vs federal, and three local-level drivers, namely (1) authority over population; (2) control over territory; and (3) access to resources.*

**Keywords:** armed conflict, intrastate armed conflict, organized violence, Southeast Asia, Uppsala Conflict Data Program

### Abstrak

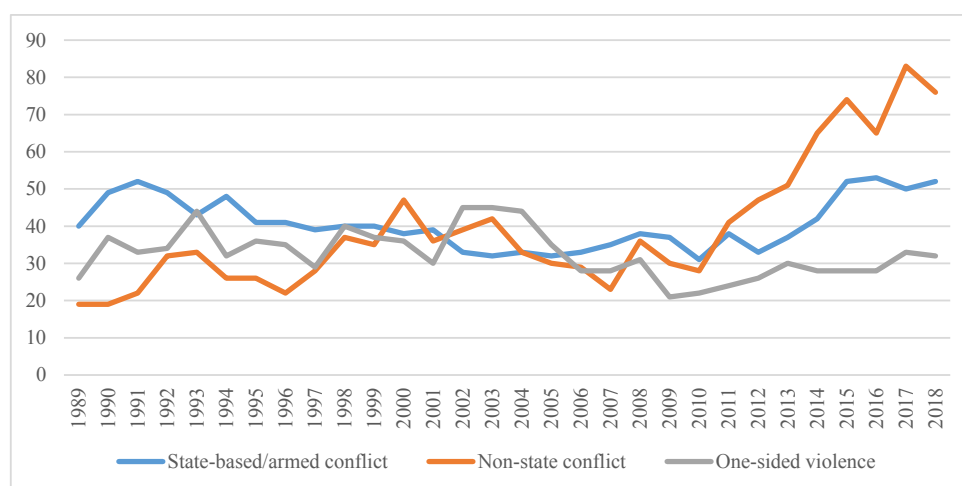
Penelitian ini mengelaborasi tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara pada rentang waktu 1989–2018 menggunakan data primer *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP). Berbeda dengan tren global yang menunjukkan kenaikan signifikan pada konflik non-negara, konflik berbasis-negara sedikit meningkat, sedangkan konflik non-negara dan kekerasan sepihak sedikit menurun. Dalam hal intensitas konflik, jumlah korban jiwa tercatat tetap tinggi akibat perang antara Islamic State dan Filipina di Marawi, Mindanao pada tahun 2017. Terdapat 186 konflik berbasis-negara/bersenjata, 23 konflik non-negara, dan 78 kekerasan sepihak di Asia Tenggara yang tercatat di dataset. Jumlah konflik antarnegara dan konflik internal yang mengalami intervensi negara lain tetap rendah, sedangkan 183 dari 186 adalah konflik bersenjata intranegara. Perebutan wilayah adalah ketidakcocokan utama dengan jumlah 135 konflik bersenjata intranegara. Penelitian ini juga mengelaborasi pemicu kekerasan terorganisasi dengan menggunakan Myanmar sebagai contoh. Sebagai negara dengan tujuh dekade pengalaman insurgensi etnis, Myanmar mendominasi statistik dengan 83 konflik, jumlah tertinggi dalam konflik bersenjata intranegara. Ketegangan dan persamaan kepentingan antara tentara Myanmar (Tatmadaw) dan kelompok etnis bersenjata adalah pemicu utama dari insurgensi. Kemudian, terdapat tiga pemicu di tingkat nasional sesuai dengan konteks dan kompleksitas Myanmar, yaitu (1) ketegangan sipil vs militer; (2) identitas; dan (3) terpusat vs federasi, dan tiga pemicu di tingkat lokal, yaitu (1) otoritas atas penduduk; (2) kontrol atas wilayah; dan (3) akses terhadap sumber daya.

**Kata kunci:** Asia Tenggara, kekerasan terorganisasi, konflik bersenjata, konflik bersenjata intranegara, *Uppsala Conflict Data Program*

## Pendahuluan

Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989 merupakan momentum penting dalam lanskap keamanan global dengan ditandai minimnya konflik bersenjata antardua negara atau lebih, atau yang disebut sebagai *interstate armed conflict*. Meskipun konflik bersenjata antaraktor negara masih muncul beberapa kali sejak tiga dekade Pascaperang Dingin, konflik intranegara serta konflik internal yang mendapat intervensi negara-negara tetangga

karakteristik-karakteristik yang membedakan. Tren kekerasan terorganisasi dapat dicermati dalam tiga jenis, sesuai dengan definisi yang telah dibatasi *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP), yaitu konflik berbasis negara atau konflik bersenjata (*state-based/armed conflict*), konflik non-negara (*non-state conflict*), dan kekerasan sepihak (*one-sided violence*).<sup>1</sup> Berikut adalah pergerakan tren kekerasan terorganisasi di tingkat global, terbagi menjadi tiga jenis konflik (lihat Gambar 1).



Sumber: *Uppsala Conflict Data Program* (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

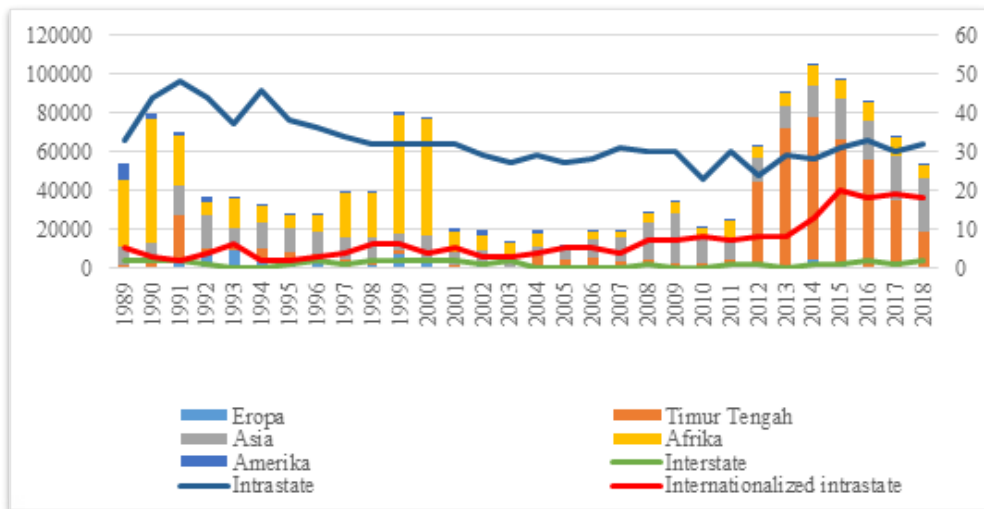
**Gambar 1.** Tren Kekerasan Terorganisasi Global, 1989–2018

(*internationalized intrastate*) adalah jenis konflik bersenjata yang mendominasi lanskap kekerasan dunia. Konflik intranegara antara kelompok milisi bersenjata dengan pemerintah, kemudian kasus ekstremisme yang meluas di Timur Tengah sejak gelombang *Arab Spring* adalah contoh dari dominasi ini. Begitu pula dengan konflik non-negara, baik perang saudara maupun antarkelompok bersenjata, yang secara jumlah dan intensitas meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari konteks ini, kita melihat ada pola pergeseran Pascaperang Dingin, dari *interstate armed conflict* ke *intrastate armed conflict*, *internationalized armed conflict*, dan perang saudara.

Sebelum mencermati tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara, pemahaman atas tren global menjadi krusial dalam memberikan latar informasi. Dengan demikian, pembaca kemudian akan mampu membaca perbandingan tren global dengan Asia Tenggara berikut

Pada tiga tahun pertama Pascaperang Dingin, konflik bersenjata masih mengalami tren peningkatan hingga mengalami puncaknya pada tahun 1991, yaitu sejumlah 52 konflik aktif di Afghanistan, Ethiopia, Angola, Burundi, Kolombia, India, Irak, Kuwait, Yugoslavia, Myanmar, dan beberapa negara lain di Afrika, dengan total kematian sejumlah 70.236 orang dalam tahun berjalan. Setelah tahun 1991, secara jumlah, konflik bersenjata mengalami tren stagnan hingga tahun 2001, namun secara intensitas, pada tahun 1999 dan 2000 meningkat secara signifikan. Tercatat, terdapat 80.578 dan 77.357 korban jiwa sepanjang tahun 1999 dan 2000 dalam 40 dan 38 konflik bersenjata berturut-turut. Perang perebutan wilayah antara Eritrea dan Ethiopia (1998–2000) menyumbang 61,5 persen dari total korban jiwa ini, yaitu 47.192

<sup>1</sup> Therese Pettersson, Stina Högladh, dan Magnus Öberg, "Organized violence, 1989–2018 and peace agreements," *Journal of Peace Research* 56, no. 4 (2019).



Sumber: *Uppsala Conflict Data Program* (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

**Gambar 2.** Jumlah dan Intensitas Konflik Bersenjata Global, Berdasarkan Region dan Jenis Konflik, 1989–2018

orang pada tahun 1999 dan 50.000 orang pada tahun 2000.<sup>2</sup>

Pada tahun 2002–2006, jumlah konflik bersenjata masih menunjukkan tren stagnan hingga perlahan bergerak meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2018, diikuti dengan peningkatan signifikan intensitas konflik sejak tahun 2012 (lihat Gambar 2). Pada tahun 2012, tercatat ada 33 konflik aktif dengan jumlah korban jiwa sebanyak 63.257 orang, meningkat drastis 153 persen dari tahun 2011 yang sejumlah 25.002 orang. Kasus-kasus insurgensi dan ekstrimisme oleh kelompok milisi bersenjata di Suriah, Afghanistan, Yaman, Somalia, Pakistan turut menyumbang atas jumlah korban jiwa ini. Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2014, yaitu sebanyak 104.555 korban jiwa dari 42 konflik bersenjata, sebuah rekor intensitas konflik bersenjata sejak Perang Dingin. Kembali, kasus insurgensi antara kelompok militan dan pemerintah di Suriah turut mendominasi korban jiwa serta eskalasi konflik di Timur Tengah. Tahun 2018 ditutup dengan catatan 53.081 korban jiwa dalam 52 konflik bersenjata, didominasi korban jiwa dari konflik antara Taliban dan pemerintah Afghanistan, serta konflik-konflik di Suriah, Yaman, dan Somalia.<sup>3</sup> Konflik non-negara

<sup>2</sup> Pettersson, Högbladh, dan Öberg, “Organized violence...”

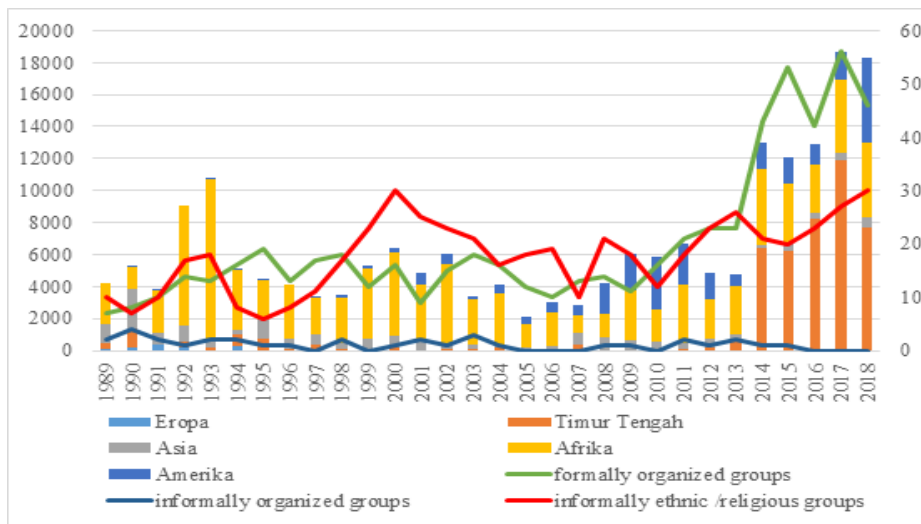
<sup>3</sup> Pettersson, Högbladh, dan Öberg; Nils Petter Gleditsch et al., “Armed Conflict 1946–2001: A

juga mengalami tren peningkatan secara global (lihat Gambar 3). Pascaperang Dingin, jumlah konflik non-negara sempat mengalami pasang surut secara jumlah antara kelompok milisi dan sipil atau kombinasi di antaranya. Jumlah konflik non-negara meningkat di tahun 1992–1993, khususnya di tahun 1993 di mana terdapat 33 konflik dengan jumlah kematian mencapai 10.739 orang, tersebar di Ethiopia, Sudan, Irak, Somalia, Afrika Selatan, Yugoslavia, Ghana, Nigeria, India, dan Tajikistan. Konflik non-negara kembali mengalami peningkatan pada tahun 2000 dan 2003, di mana terdapat 47 dan 42 konflik berturut-turut dengan intensitas yang lebih rendah, tersebar di benua Afrika dengan Nigeria dan Kongo tercatat sebagai konflik dengan intensitas kekerasan tertinggi. Sejalan dengan tren konflik bersenjata, konflik non-negara juga mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2011 hingga 2018 secara jumlah dan intensitas. Misalnya, pada tahun 2017 adalah rekor tertinggi jumlah konflik non-negara terbanyak dengan total 83 konflik. Angka ini mengalami penurunan 8 persen pada saat 2018 ditutup, dengan 76 konflik non-negara.<sup>4</sup>

New Dataset,” *Journal of Peace Research* 39, no. 5 (2002).

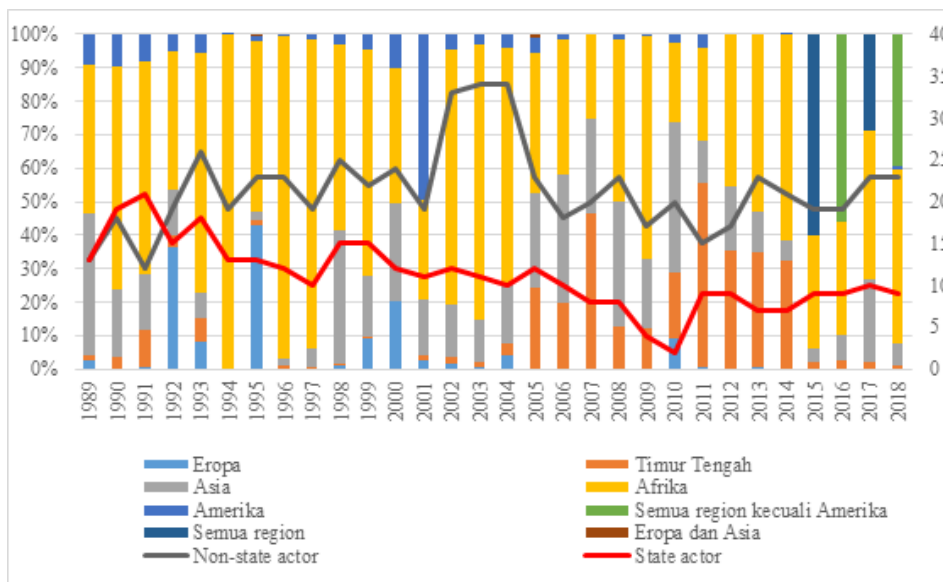
<sup>4</sup> Ralph Sundberg, Kristine Eck, dan Joakim Kreutz, “Introducing the UCDP Non-State Conflict Dataset,” *Journal of Peace Research* 49, no. 2 (2012); Pettersson, Högbladh, dan Öberg, “Organized violence, 1989–2018 and peace agreements.”





Sumber: Uppsala Conflict Data Program (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

**Gambar 3.** Jumlah dan Intensitas Konflik Non-Negara Global, Berdasarkan Region dan Subkategori Kelompok, 1989–2018



Sumber: Uppsala Conflict Data Program (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

**Gambar 4.** Jumlah dan Intensitas Kekerasan Sepihak Global, Berdasarkan Region dan Aktor, 1989–2018

Ketiga, dan terakhir, jenis kekerasan sepihak yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara, di mana mereka melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Jika dicermati, kasus-kasus kekerasan sepihak didominasi oleh kasus yang terjadi di Afrika, diikuti dengan Asia (lihat Gambar 4). Contoh kasus kekerasan sepihak dengan jumlah korban jiwa tertinggi adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda pada 1994 terhadap masyarakat sipil di Burundi, Kongo, dan Zimbabwe, di mana diestimasikan sekitar 500.000 orang meninggal. Kemudian, kekerasan

yang dilakukan oleh Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo (AFDL) terhadap sipil di Kongo juga turut menyumbang 30.110 korban jiwa. Aktor non-negara mendominasi jumlah kasus kekerasan sepihak, hampir 50 persen lebih banyak daripada aktor negara. Islamic State (IS) tercatat sebagai salah satu aktor non-negara yang banyak melakukan kekerasan sepihak, tersebar di seluruh benua dengan estimasi korban jiwa sebanyak 27.256 orang, sepanjang tahun 2004–2018.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Kristine Eck dan Lisa Hultman, “Violence Against Civilians in War,” *Journal of Peace Research* 44, no. 2 (2007); Pettersson, Högbladh, dan Öberg,

Dari pencermatan empat grafik di atas, penulis menyimpulkan beberapa catatan penting dari tren global atas kekerasan terorganisasi. *Pertama*, konflik non-negara (*non-state conflict*) mengalami tren peningkatan signifikan mulai tahun 2011, sedangkan konflik bersenjata dan kekerasan sepihak menunjukkan tren stagnan sepanjang tiga dekade Pascaperang Dingin. *Kedua*, konflik intranegara (*intrastate armed conflict*) adalah jenis kekerasan yang mendominasi dinamika konflik berbasis negara. *Ketiga*, konflik intranegara yang mengalami intervensi negara lain (*internationalized intrastate armed conflict*) mengalami tren peningkatan pada lima tahun terakhir. *Keempat*, terjadi pergeseran episentrum konflik bersenjata dari Afrika ke Timur Tengah, dengan jumlah dan intensitas meningkat signifikan. *Kelima*, jenis konflik non-negara yang dilakukan oleh *formally organized groups* dan *informally ethnic/religious groups* mengalami tren peningkatan, khususnya meningkat secara signifikan sejak lima tahun terakhir yang disebabkan oleh intensitas kekerasan yang dilakukan Islamic State (IS). Oleh karena itu, *keenam*, muncul episentrum baru dalam konflik non-negara, yaitu Timur Tengah, mendampingi Afrika yang sejak Pascaperang Dingin sudah mengalami intensitas tinggi. *Ketujuh*, pelaku kekerasan sepihak didominasi oleh aktor non-negara, di mana pada empat tahun terakhir, Islamic State menjadi aktor yang berpengaruh pada kasus-kasus kekerasan serta melakukan ekspansi ke-12 negara di dunia dari seluruh region.

Penelitian ini mengambil Asia Tenggara sebagai upaya memperkecil ruang pencermatan dari tren global, namun pada saat yang bersamaan juga sebagai upaya memperdalam pemahaman dinamika konflik di kawasan. Sebagian besar negara di Asia Tenggara adalah negara dunia ketiga<sup>6</sup>, sebuah label bagi negara-negara yang tidak beraliansi, baik kepada Amerika Serikat maupun Uni Soviet semasa Perang Dingin. Pascaperang Dingin, terminologi ini bergeser untuk menggambarkan negara berkembang yang

---

“Organized violence, 1989–2018 and peace agreements.”

<sup>6</sup> Filipina tergabung dalam aliansi Amerika Serikat, sementara Vietnam tergabung dalam aliansi Uni Soviet.

masih mengalami masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, lingkungan yang saling mengait serta multidimensional. Karena pergeseran makna ini, para sarjana di dunia lebih sering menggunakan istilah negara berkembang dan *Global South*.

Kondisi ini menyebabkan Asia Tenggara rentan konflik, baik itu konflik bersenjata, konflik non-negara seperti perang saudara, atau kekerasan sepihak seperti kekerasan terstruktur pemerintah terhadap warga negara. Dalam *Uppsala Conflict Data Program* versi 19.1, tercatat terdapat 186 konflik bersenjata, 23 konflik non-negara, dan 78 kekerasan sepihak yang terjadi di tujuh negara Asia Tenggara sepanjang tiga dekade 1989–2018 (lihat Apendiks 1-3). Data ini, jika di-*breakdown* sampai ke kejadian atau insiden, akan didapatkan sebanyak 11.177 kejadian kekerasan sepanjang 1989–2018 di Asia Tenggara, terbagi menjadi 6.960 insiden dalam konflik bersenjata, 256 insiden dalam konflik non-negara, serta 3.961 insiden kekerasan sepihak (lihat Apendiks 4). Pada tahun 2018 saja, terdapat 8 konflik bersenjata di Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Thailand, baik itu dalam perebutan pemerintah maupun wilayah. Konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia vs Organisasi Papua Merdeka (OPM); Pemerintah Myanmar vs Palaung State Liberation Front (PSLF), Arakan Army (AA), dan Kachin Independence Organisation (KIO); Pemerintah Filipina vs Islamic State (IS), Kelompok Abu Sayyaf (ASG), dan Partai Komunis Filipina (CPP); serta Pemerintah Thailand vs kelompok insurgensi di Patani adalah beberapa *highlight* konflik di Asia Tenggara di tahun 2018 saja. Oleh karena itu, menarik untuk memperdalam dinamika konflik di konteks subregional karena dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan keamanan di tingkat subregional.<sup>7</sup>

Berdasarkan data-data di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut, apakah tren yang terbentuk di tingkat subregion Asia Tenggara sejalan dengan tren global? Apakah ketujuh temuan awal di tren global, juga muncul di tren Asia Tenggara? Apa saja pemicu atas

---

<sup>7</sup> Pettersson, Högladh, dan Öberg, “Organized violence, 1989–2018 and peace agreements.”

jumlah konflik yang menonjol? Tiga pertanyaan mendasar ini akan dijawab menggunakan data primer dari *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP).<sup>8</sup> Tidak hanya menggunakan data, definisi atas kekerasan terorganisasi juga merujuk pada definisi yang dibangun oleh UCDP untuk kesinambungan pemahaman dan penguatan landasan teori dalam membaca visualisasi data. Untuk menjelaskan pemicu, penulis menggunakan Myanmar sebagai contoh negara yang paling banyak mengalami konflik bersenjata.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan dataset konflik yang didokumentasikan oleh UCDP. Terdapat beberapa dataset konflik dunia selain UCDP, seperti *Correlates of War* (COW), namun UCDP dipilih karena memiliki rentang waktu paling aktual sampai tahun 2018, sedangkan COW hanya merekam sampai tahun 2014.

Penelitian ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, literatur yang relevan, selang pandang UCDP, dan metode. Kedua adalah pembahasan, yang terdiri atas dua bahasan utama, yaitu tren dan pemicu kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara. Kemudian akan ditutup pada bagian ketiga, yang terdiri atas kesimpulan.

---

<sup>8</sup> *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP) adalah proyek dokumentasi atas kekerasan terorganisasi yang dikerjakan oleh Uppsala University (UU) dan Peace Research Institute of Oslo (PRIO). Serangkaian dataset yang berhasil didokumentasikan oleh UCDP adalah termasuk konflik bersenjata yang terjadi sejak 1946. Definisi-definisi atas konflik telah menjadi standar global dalam mendalami studi perdamaian dan konflik, seperti SIPRI Yearbook. UCDP disusun secara sistematis, memiliki cakupan global, dapat dibandingkan antarkasus dan negara, serta diperbarui setiap tahun. Oleh karena itu, dataset ini merupakan salah satu dataset paling ekstensif dan kerap dijadikan sumber data konflik paling dapat dipercaya. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi <http://ucdp.uu.se/>.

## Metode

Penelitian ini menggunakan dataset *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP) versi 19.1, yang terdiri atas UCDP/PRIO *Armed Conflict Dataset* 1946-2018<sup>9</sup>, UCDP *Non-State Conflict Dataset*<sup>10</sup>, UCDP *One-Sided Violence Dataset*<sup>11</sup>, UCDP *Battle-Related Deaths Dataset*<sup>12</sup>, dan UCDP *Georeference Event Dataset Global*<sup>13</sup> dengan cakupan yang terjadi dalam rentang waktu 1 Januari 1989 sampai 31 Desember 2018 yang diunduh dari halaman <https://ucdp.uu.se/downloads/>. Tujuan pembangunan dataset ini adalah untuk memberikan data kasus atau kejadian terstruktur dan komprehensif tentang kekerasan terorganisasi pasca-1989, kepada dunia akademik, yang terpilah secara negara-tahun. Tidak hanya itu, dataset ini merekam kejadian atau insiden kekerasan di suatu wilayah dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat konflik. Penulis melakukan sortir data berdasarkan lokasi untuk menyaring Asia Tenggara dari data global. Berdasarkan data sortir tersebut, penulis kemudian membuat berbagai visualisasi data untuk memahami tren dan pola yang muncul. Dalam mendokumentasikan data korban jiwa, UCDP menyediakan tiga jenis estimasi jumlah korban jiwa, yaitu *best*, *low*, dan *high*. Estimasi *low* dan *high* adalah estimasi angka terendah dan tertinggi atas korban jiwa, sedangkan *best* adalah estimasi terbaik yang didapatkan dari berbagai macam sumber primer dan sekunder. Sajian data korban jiwa dalam tulisan ini menggunakan jenis estimasi *best* UCDP.

<sup>9</sup> Pettersson, Högbladh, dan Öberg, "Organized violence, 1989–2018 and peace agreements"; Gleditsch et al., "Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset."

<sup>10</sup> Sundberg, Eck, dan Kreutz, "Introducing the UCDP Non-State Conflict Dataset"; Pettersson, Högbladh, dan Öberg, "Organized violence, 1989–2018 and peace agreements."

<sup>11</sup> Eck dan Hultman, "Violence Against Civilians in War"; Pettersson, Högbladh, dan Öberg, "Organized violence, 1989–2018 and peace agreements."

<sup>12</sup> Pettersson, Högbladh, dan Öberg, "Organized violence, 1989–2018 and peace agreements."

<sup>13</sup> Ralph Sundberg dan Erik Melander, "Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset," *Journal of Peace Research* 50, No. 4 (2013); Stina Högbladh, "UCDP GED Codebook version 19.1" (Uppsala: Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2019).

## Kerangka Konseptual: Tipologi Kekerasan Terorganisasi

Dalam memahami ruang lingkup dalam definisi-definisi di dalam penelitian ini, penting untuk memahami tipologi kekerasan terorganisasi. UCDP membagi kekerasan terorganisasi menjadi tiga, yaitu konflik berbasis negara (*state-based conflict*), konflik non-negara (*non-state conflict*), dan kekerasan satu sisi (*one-sided violence*). Sebuah konflik akan dimasukkan dalam dataset UCDP jika intensitas konflik memenuhi ambang batas 25 kematian (*fatalities*) di dalam tahun berjalan. Konflik berbasis negara dapat disebut sebagai perang jika angka kematian kumulatif mencapai 1.000 korban jiwa, sedangkan disebut konflik minor jika jumlah kematian kumulatif dalam rentang angka 25–1.000 korban jiwa.

**Tabel 1.** Tipologi Kekerasan Terorganisasi UCDP

Tipologi Kekerasan Terorganisasi	
<b>Konflik berbasis negara</b> ( <i>state-based/armed conflict</i> )	<i>Interstate armed conflict</i>
	<i>Intrastate armed conflict</i>
	<i>Extrastate armed conflict</i>
	<i>Internationalized intrastate armed conflict</i>
<b>Konflik non-negara</b> ( <i>non-state conflict</i> )	<i>Formally organized groups</i>
	<i>Informally organized groups</i>
	<i>Informally organized ethnic/religious groups</i>
<b>Kekerasan sepihak</b> ( <i>one-sided violence</i> )	<i>State actors</i>
	<i>Non-state actors</i>

Sumber: Pettersson, Högbladh, & Öberg (2019) (telah diolah kembali oleh penulis)

Konflik berbasis negara (*state-based conflict*), atau kerap disebut sebagai konflik bersenjata (*armed conflict*), yaitu ketidakcocokan yang diperebutkan (*contested incompatibility*), baik itu wilayah atau pemerintahan atau keduanya, di mana digunakan pasukan bersenjata oleh kedua pihak, yang salah satunya adalah aktor pemerintah atau negara, yang menyebabkan paling tidak 25 kematian per tahun. Kekerasan jenis ini dibedakan menjadi empat jenis, sesuai dengan definisi yang digunakan dalam proyek *The Correlates*

*of War* (COW).<sup>14</sup>

1. *Interstate armed conflict*, terjadi antara dua atau lebih negara.
2. *Intrastate armed conflict*, terjadi antara pemerintah dan kelompok oposisi internal, tanpa intervensi dari negara lain.
3. *Extrastate armed conflict*, terjadi antara negara dan kelompok non-negara di luar teritori;
  - a. *Internationalized intrastate armed conflict*, terjadi antara pemerintah dan kelompok oposisi internal, dengan intervensi dari negara lain.<sup>15</sup>
  - b. Konflik non-negara (*non-state conflict*), yaitu penggunaan pasukan bersenjata antara dua kelompok bersenjata terorganisasi, di mana keduanya bukan aktor pemerintah atau negara, yang menyebabkan setidaknya 25 kematian per tahun.
  - c. Kekerasan sepihak (*one-sided violence*), yaitu penggunaan pasukan bersenjata yang dengan sengaja dilakukan oleh pemerintah atau negara atau kelompok terorganisasi secara formal, terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan setidaknya 25 kematian per tahun.<sup>16</sup>

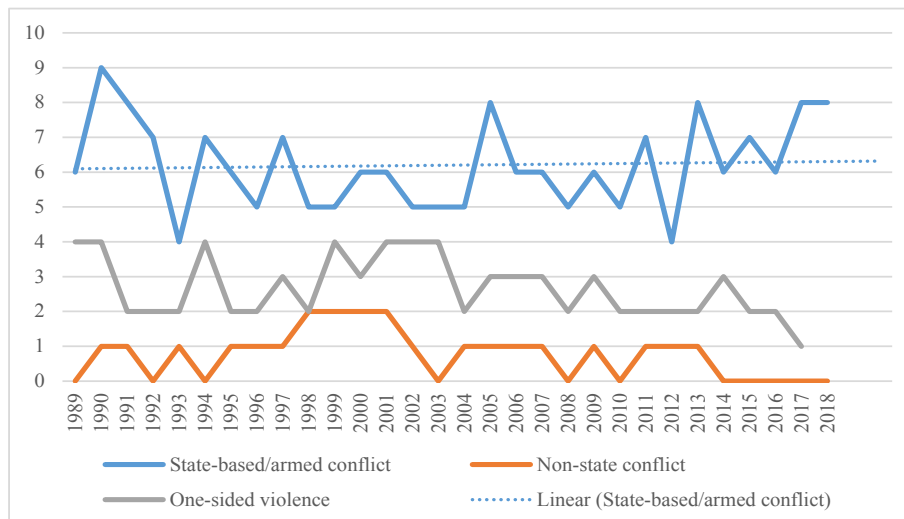
## Tren Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara (1989–2018)

Secara umum, terdapat perbedaan antara tren global dan tren Asia Tenggara. Jika tren global menunjukkan bahwa konflik non-negara mengalami peningkatan signifikan, tren Asia Tenggara menunjukkan hal sebaliknya. Sepanjang tiga dekade Pascaperang Dingin, garis tren konflik bersenjata sedikit meningkat,

<sup>14</sup> The Correlates of War adalah proyek pengumpulan, diseminasi, dan penggunaan data kuantitatif yang akurat dan reliable di bidang hubungan internasional. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi <http://correlatesofwar.org/>.

<sup>15</sup> Meredith Reid Sarkees dan Frank Wayman, *Resort to War: 1816–2007* (Washington D.C.: CQ Press, 2010).

<sup>16</sup> Gleditsch et al., “Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset.”



Sumber: Uppsala Conflict Data Program (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

**Gambar 5.** Tren Kekerasan Terorganisasi Asia Tenggara, 1989–2018

sementara konflik non-negara dan kekerasan sepihak sedikit menurun dengan dinamika jumlah yang tidak signifikan. Namun, menarik untuk melihat bahwa konflik bersenjata masih mendominasi kekerasan terorganisasi di kawasan Asia Tenggara. Angka konflik bersenjata jauh di atas konflik non-negara dan kekerasan sepihak, yang stabil di angka rendah (lihat Gambar 5).

### Konflik Berbasis Negara/Bersenjata 1989–2018: Dominasi *Intrastate Armed Conflict*

Terdapat 186 konflik bersenjata di kawasan Asia Tenggara dalam rentang tiga dekade. Jumlah ini terbagi menjadi beberapa subkategori: *Pertama*, berdasarkan intensitasnya, terdapat 180 konflik minor dan 6 perang. *Kedua*, berdasarkan jenisnya, terdapat 1 *interstate armed conflict*, 183 *intrastate armed conflict*, dan 2 *internationalized intrastate armed conflict*. *Ketiga*, berdasarkan ketidakcocokan, terdapat 137 konflik perebutan teritori atau wilayah dan 49 konflik perebutan kekuasaan atau pemerintahan. *Keempat*, berdasarkan lokasi, yaitu Kamboja 11 konflik, Indonesia 14 konflik, Laos 2 konflik, Malaysia 1 konflik, Myanmar 83 konflik, Filipina 59 konflik, dan Thailand 16 konflik (lihat Apendiks 1). Dalam konflik bersenjata, jumlah konflik cenderung meningkat dengan rata-rata 6.2 konflik per tahun dengan jumlah tertinggi pada tahun

1990 di mana terdapat 9 konflik di kawasan. Meskipun demikian, jumlah korban jiwa terkait konflik mengalami beberapa kali kenaikan dan penurunan signifikan. Pada tahun 2017, tercatat terdapat 2.097 korban jiwa, rekor tertinggi sejak tahun 2000.

Berdasarkan intensitasnya, konflik minor, konflik dengan korban jiwa kurang dari 1.000 orang, mendominasi konflik bersenjata di Asia Tenggara dengan jumlah 180. Hanya 6 konflik bersenjata yang intensitasnya sudah dapat dikategorikan sebagai perang karena merenggut 1.000 korban jiwa. Filipina dan Myanmar adalah dua negara yang beberapa kali mengalami perang. Pemerintah Myanmar melawan KNU dalam pemberontakan di Kayin State. Sementara Pemerintah Filipina melawan kelompok militia (ASG, MILF, MNLF, IS) dan partai komunis (CPP) dalam perebutan wilayah dan kekuasaan.

Berdasarkan jenisnya, konflik antarnegara (*interstate*) dan konflik internal yang diintervensi oleh negara lain (*internationalized intrastate*) tetap langka di Asia Tenggara. Data ini sejalan dengan tren global di mana konflik intra-negara mendominasi konflik bersenjata dengan total 183 konflik. Sepanjang tiga dekade, hanya 1 *interstate armed conflict* yang terjadi, yaitu pada tahun 2011 di mana terdapat konflik perbatasan antara Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Thailand. Daerah kuil Preah Vihear yang terletak di perbatasan Kamboja-

Thailand telah menjadi bahan perdebatan antara dua negara sejak tahun 1867. Sengketa wilayah berlarut-larut kemudian berubah menjadi konflik bersenjata yang menewaskan sekitar 29 korban jiwa. Kemudian, terdapat 2 *internationalized intrastate armed conflict* yang terjadi pada 1989 dan 2017. Tahun 1989 terjadi konflik bersenjata antara Pemerintah Kamboja bersama Pemerintah Vietnam dengan FUNCINPEC, KPNLF, dan Khmer Merah serta pada tahun 2017 antara Pemerintah Filipina bersama Pemerintah Malaysia dengan Kelompok Abu Sayyaf, kelompok pembajak dan militan jihadis yang terafiliasi dengan IS, di Mindanao.

Asia Tenggara hanya mengalami 2 *internationalized intrastate armed conflict* sepanjang tiga dekade. Jumlah ini tidak sejalan dengan tren global, di mana sepanjang 2014–2018 terdapat rata-rata 17.8 konflik jenis ini per tahun. Mayoritas eskalasi konflik dipengaruhi oleh kelompok IS beserta afiliasi-afiliasi lokalnya. Menurut Finnbogason dan Svensson, kawasan ini terhindar dari internasionalisasi dan eskalasi konflik intranegara karena kelompok jihadis karena dua faktor (1) keterbukaan kanal politik dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi Islamis dan (2) represi pemerintah.<sup>17</sup>

Pertama, adanya keterbukaan bagi kelompok masyarakat sipil dan partai politik untuk menggaungkan aspirasi-aspirasi Islami dan mendapatkan ruang untuk berpartisipasi. Kerangka konstitusi di negara mayoritas muslim seperti Malaysia dan Indonesia telah menciptakan ruang demokratis dalam gerakan Islamis agar mereka dapat memobilisasi dan menyalurkan ambisi politik sehingga mengurangi potensi penggunaan kekerasan. Kedua, adanya upaya kontra-terorisme terhadap kelompok jihadis dari pemerintah yang represif dan efektif, khususnya sejak Jamaah Islamiyah (JI). Sejak tahun 2000, pemerintahan di Asia Tenggara mengoordinasikan upaya mereka dalam menyidik dan menangkap jaringan JI melalui berbagi informasi intelijen. Penangkapan-penangkapan ini berhasil

<sup>17</sup> Daniel Finnbogason dan Isak Svensson, "The Missing Jihad: Why Have There Been No Jihadist Civil Wars in Southeast Asia?," *The Pacific Review* 31, no. 1 (2017): 96–115.

menekan penguatan dan pembentukan kembali JI.<sup>18</sup>

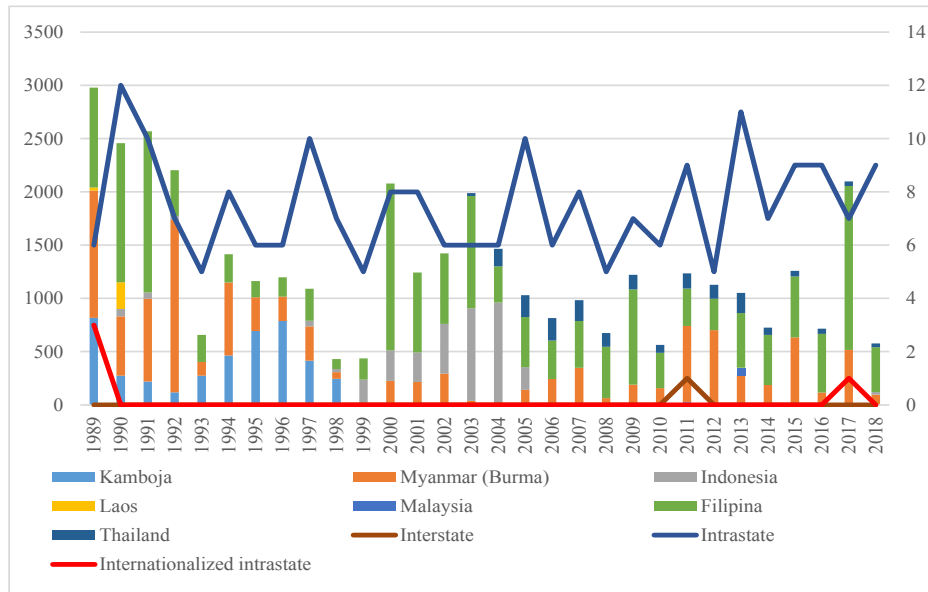
Meskipun IS telah tersingkir di Suriah dan Irak, ideologi global dan transnasional atas khalifah masih mengakar dan menarik kelompok-kelompok lain termasuk jihadis lokal.<sup>19</sup> Terlebih ketika para ahli menyimpulkan bahwa IS akan menjadikan Asia Tenggara sebagai panggung kedua.<sup>20</sup> Hal ini dikonfirmasi saat pengumuman reorganisasi wilayah oleh badan berita IS, Al-Naba, bahwa terdapat penambahan provinsi di Asia Tenggara: Wilayah *Sharq Asiyya*. IS mendeklarasikan provinsi baru ini terbentang dari Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand Selatan, dan Myanmar. Sebelum deklarasi ini, IS telah mengklaim wilayah di Filipina Selatan yang dikenal sebagai Wilayah Filipina dan Wilayah Asia Timur.<sup>21</sup> Kelompok Abu Sayyaf dan Kelompok Santoso di Poso, Indonesia adalah kelompok jihadis lokal pertama yang bergabung ke afiliasi IS. Dengan demikian, para pemerintahan di negara Asia Tenggara perlu meningkatkan kewaspadaan dan intensitas kerja sama keamanan kawasan. Dalam hal konflik intranegara, pada tahun 2018 saja, UCDP mencatat terdapat 8 konflik bersenjata yang seluruhnya berjenis *intrastate conflict*. Jumlah ini sama dengan tahun 2017, namun meningkat 33 persen dari 2016 dengan total 6 konflik. Tahun 1990 tercatat sebagai jumlah konflik terbanyak dalam tahun berjalan dengan 9 konflik, tertinggi sejak 1989. Konflik perebutan kekuasaan (4 konflik) dan wilayah (5 konflik) mendominasi angka ini, seperti Pemerintah Kamboja vs Khmer Merah dan Khmer People

<sup>18</sup> Finnbogason dan Svensson.

<sup>19</sup> Mona Kanwal Sheikh, ed., *Global Jihad in Southeast Asia: Examining The Expansion of The Islamic State and al-Qaeda* (Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2019).

<sup>20</sup> Faris Mokhtar, "The Big Read: Battered in the Middle East, Islamic State Eyes Southeast Asia as Next Terrorism Hotspot," Channel News Asia, 2019, <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/islamic-state-terrorism-extremism-eyes-southeast-asia-11199586>.

<sup>21</sup> Zachary Abuza, "In Organizational Shake-Up, IS Names New Province in Southeast Asia," BenarNews, 2018, <https://www.benarnews.org/english/commentaries/asean-security-watch/is-province-07232018160808.html>.



Sumber: Uppsala Conflict Data Program (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

**Gambar 6.** Jumlah dan Intensitas Konflik Bersenjata Asia Tenggara Berdasarkan Lokasi dan Jenis Konflik, 1989–2018

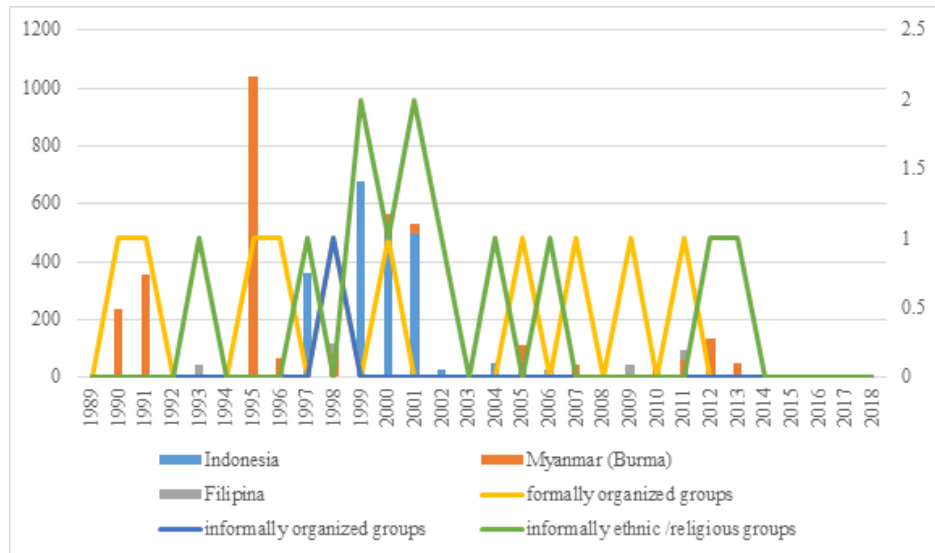
National Liberation Front; Pemerintah Indonesia vs Gerakan Aceh Merdeka (GAM); Pemerintah Laos vs Lao Resistance Movement (LRM); Pemerintah Myanmar vs Karen National Union (KNU), All Burma Students's Democratic Front (ABSDF), New Mon State Party (NMSP), dan Kachin Independence Organisation (KIO); serta Pemerintah Filipina vs Partai Komunis Filipina, faksi militer, Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan Moro National Liberation Front (MNLF).

Dalam konteks korban jiwa, Filipina menyumbang angka terbesar dalam konflik bersenjata di kawasan selama tiga dekade terakhir (lihat Gambar 6). Dari total korban jiwa 38.956 orang, sebanyak 17.772 korban jiwa adalah korban konflik bersenjata di Filipina, atau sebesar 45.6 persen. Konflik bersenjata terhadap IS terjadi di Filipina di 2017 adalah salah satu eskalasi konflik tertinggi yang menewaskan sekitar 1.363 orang. Konflik antara Pemerintah Filipina dan Partai Komunis Filipina sepanjang tahun 1989–2018 telah menewaskan sebanyak 7.970 orang dengan rata-rata 266 orang per tahun.

Kemudian, berdasarkan ketidakcocokan (*incompatibility*), terdapat 137 konflik yang memperebutkan wilayah dan 49 konflik memperebutkan kekuasaan. Dari 137 konflik,

Myanmar mendominasi dengan 74 konflik terkait kelompok insurgensi bersenjata, yang tersebar di Provinsi Arakan, Kachin, Kayin, Mon, Nagaland, Karenni, Shan, Kokang, dan Wa. Filipina mengalami 31 insurgensi yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf, MILF, MNLF, dan BIFM. Partai Komunis Filipina melalui serangkaian perang gerilya sejak organisasi ini didirikan. Thailand dengan 16 konflik terkait insurgensi di Patani, Thailand Selatan sejak 2003–2018. Sementara itu, Indonesia terdapat 14 konflik terkait insurgensi di Aceh dan Papua, serta perang dengan Fretilin di Timor Timur. Sementara dari 49 konflik perebutan kekuasaan, didominasi oleh 28 konflik antara Pemerintah Filipina dan Partai Komunis Filipina (CPP).

Berdasarkan lokasi, Myanmar mencatat jumlah tertinggi dengan 83 konflik bersenjata, yang semuanya merupakan *intrastate conflict*. Pada tahun 2018 saja, tercatat ada 2 konflik bersenjata menghadapi kelompok pemberontak di wilayah Arakan dan Kachin. Kemudian diikuti dengan Filipina dengan 59 konflik, terdiri atas 58 *intrastate conflict* dan 1 *internationalized conflict*. Partai Komunis Filipina dan kelompok insurgensi bersenjata di Filipina Selatan masih menjadi ancaman utama bagi perdamaian Pemerintah Filipina, baik itu secara wilayah maupun kekuasaan.



Sumber: Uppsala Conflict Data Program (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

**Gambar 7.** Jumlah dan Intensitas Konflik Non-Negara Asia Tenggara, Berdasarkan Lokasi dan Subkategori Kelompok, 1989–2018

### Konflik Non-Negara 1989–2018: Kompleksitas *Civil War*

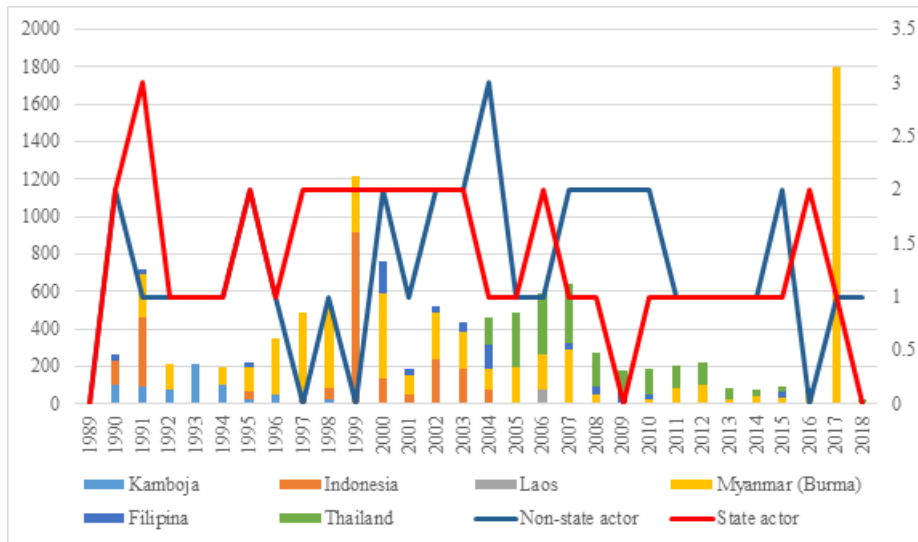
Terdapat 23 konflik non-negara di kawasan Asia Tenggara dalam rentang tiga dekade. Jumlah ini terbagi menjadi beberapa subkategori: *Pertama*, berdasarkan jenis kelompok, terdapat 10 konflik yang dilakukan oleh *formally organized groups*, 1 konflik oleh *informally organized groups*, dan 12 konflik oleh *informally ethnic/religious groups*. *Kedua*, berdasarkan lokasi, yaitu Kamboja 0 konflik, Indonesia 7 konflik, Laos 0 konflik, Malaysia 0 konflik, Myanmar 11 konflik, Filipina 5 konflik, dan Thailand 0 konflik (lihat Apendiks 2).

Berbeda dengan tren global yang menunjukkan kenaikan signifikan atas konflik non-negara, tren Asia Tenggara tidak menunjukkan tren yang sama. Jumlah konflik non-negara stabil di angka rendah dengan rata-rata 0.76 konflik per tahun. Meskipun tren tiga dekade menunjukkan jumlah konflik cenderung menurun, tidak demikian dengan jumlah korban jiwa yang hilang akibat konflik. Tahun 1995 tercatat adalah jumlah kematian tertinggi, sebanyak 1.042 korban jiwa, akibat konflik non-negara yang dilakukan oleh *formally organized groups*. Konflik ini terjadi di Myanmar antara kelompok Mong Tai Army (MTA) dan United Wa State Army (UWSA) yang sebenarnya telah merenggut korban jiwa sejak tahun 1990.

Kedua kelompok ini adalah kalangan minoritas (Suku Shan dan Suku Wa) Myanmar yang memperebutkan wilayah perdagangan opium serta melakukan pemberontakan separatisme terhadap Pemerintah Myanmar. Selain itu, konflik terjadi antara Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) vs Karen National Union, Mongko Defence Army (MDA) vs MDA Faksi Lin Min, serta Restoration Council of Shan State (RCSS) vs UWSA. Konflik akibat *formally organized groups* juga terjadi di Filipina, di mana Klan Caludtiag dan Klan Karon serta BIFM vs MILF terlibat perebutan wilayah dan kekuasaan atas desa-desa di Mindanao.

Hanya 1 kasus konflik yang disebabkan oleh kelompok *informally organized groups*, yaitu di Filipina, antara Klan Haji Faizal Abdulkarim dan Klan Haji Masir Ahalul yang telah menjadi musuh bebuyutan sejak awal 1980-an. Eskalasi konflik ini diakibatkan oleh sengketa dua klan atas Pulau Bubuan, Filipina Selatan. Atas kejadian ini, 30 orang meninggal dan 200 keluarga mengungsi ke Pulau Basilan. Ketujuh konflik non-negara yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh *informally ethnic/religious groups*, seperti konflik Dayak vs Madura (1997, 1999, 2001) dan Kristen vs Muslim (1999, 2000, 2002, 2004) akibat marginalisasi serta ketimpangan ekonomi, politik, dan sosial





Sumber: Uppsala Conflict Data Program (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

**Gambar 8.** Jumlah dan Intensitas Kekerasan Sepihak Asia Tenggara, Berdasarkan Region dan Aktor, 1989–2018

dari pemerintah pusat. Tensi kedua komunitas ini sudah terasa sejak 1980-an, namun akibat krisis ekonomi dan transisi demokrasi di akhir 1990-an, konflik komunal tidak dapat dihindari. Kemudian, di Myanmar terjadi tiga kali konflik antara Buddha dan Muslim (2001, 2012, 2013) akibat akar permasalahan yang kompleks seperti demografi, aspirasi otonomi, dan bias pihak pemerintah terhadap kelompok etnis minoritas.

### **Kekerasan Sepihak 1989-2018: Rentannya Masyarakat Sipil**

Terdapat 78 kekerasan sepihak di kawasan Asia Tenggara dalam rentang tiga dekade. Jumlah ini terbagi menjadi beberapa subkategori: *Pertama*, berdasarkan pelaku atau aktornya, terdapat 40 aktor negara dan 38 aktor non-negara. *Kedua*, berdasarkan lokasi, yaitu Kamboja 9 kekerasan, Indonesia 15 kekerasan, Laos 1 kekerasan, Malaysia 0 kekerasan, Myanmar 26 kekerasan, Filipina 14 kekerasan, dan Thailand 13 kekerasan (lihat Apendiks 3). Sama halnya dengan tren konflik non-negara, jumlah kekerasan sepihak cenderung menurun dengan rata-rata 2.6 kekerasan per tahun.

Jika dicermati berdasarkan aktor atau pelaku kekerasan, aktor negara dan non-negara hampir sama jumlahnya. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil rentan

mengalami kekerasan dari kedua aktor. Dari 40 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara, 25 kasus dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Kekerasan terhadap masyarakat sipil dilancarkan pemerintah dengan tujuan (1) menekan protes atau kritik terhadap pemerintah dan (2) strategi represi terhadap *intrastate conflict* seperti insurgensi, yang banyak terjadi di Myanmar. Pada tahun 2017, tercatat korban jiwa yang signifikan akibat kekerasan skala besar yang dilakukan oleh pemerintah terhadap muslim Rohingya di Rakhine. Sejumlah 650 ribu dari 1 juta penduduk Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Kasus 2017 ini diestimasikan merenggut korban jiwa 1.728 orang, perkiraan terbaik karena kesulitan mengumpulkan data korban jiwa sesungguhnya (lihat Gambar 8).

Indonesia mengalami 10 kekerasan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, secara spesifik adalah TNI. Sejak tahun 1989, TNI telah melakukan kekerasan sepihak dalam konteks konflik separatisme di Timor Timur, Aceh, dan Papua. Kekerasan sepihak juga digunakan untuk menekan demonstrasi anti pemerintah di tahun 1998. Jamaah Islamiyah, GAM, dan Laskar Jihad adalah beberapa contoh aktor non-negara yang melakukan kekerasan sepihak di Indonesia. Kasus Bom Bali I dan II adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh JI. Sama halnya dengan GAM, kelompok separatisme di Filipina (MILF, ASG, Partai

Komunis, dan Al-Khobar) juga beberapa kali menyerang masyarakat sipil sepanjang rentang waktu 1995–2015. Hal yang sama juga terjadi di Thailand, kelompok separatis di Patani melakukan serangkaian kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam kurun waktu 2004-2018.

## **Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara (1989–2018): Memahami Konteks dan Kompleksitas Myanmar**

Setelah membaca uraian sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa konflik berbasis negara atau konflik bersenjata mendominasi kawasan dengan jumlah 186 konflik. Sejumlah 183 konflik bersenjata adalah jenis *intrastate conflict*, yaitu antara aktor negara dengan aktor non-negara, kemudian 135 di antaranya adalah konflik yang disebabkan perebutan wilayah atau konflik separatisme di dalam negara. Sejumlah 74 konflik di antaranya terjadi di Myanmar, serta 30 konflik terjadi di Filipina.

Subbagian ini tidak akan menjelaskan setiap pemicu kekerasan terorganisasi yang ada di Asia Tenggara karena kompleksitas dan karakteristik konflik di dalamnya, serta dimensi-dimensi lain seperti sejarah, sistem politik, sosial budaya, yang berbeda-beda. Subbagian ini mengelaborasi hanya pemicu-pemicu *intrastate conflict* atas perebutan wilayah yang terjadi di Myanmar karena memiliki jumlah konflik tertinggi dari keseluruhan jumlah konflik di Asia Tenggara.

Menurut Ernie Regher, terdapat empat syarat dasar dalam kerangka mengelaborasi pemicu konflik bersenjata, yaitu duka (*grievance*), identitas (*identity*), kapasitas, dan tidak ada alternatif lain (*the lack of alternatives*).

- a. Adanya duka atas situasi politik, ekonomi, dan sosial yang meningkat (*grievance*);
- b. Kompetisi dan konflik antarkelompok (*identity*);
- c. Kesiapan dan kapasitas (sekurangnya dari satu pihak) untuk menggunakan kekerasan dan melanggar hak asasi manusia (*capacity*); dan

- d. Tidak adanya jalur lain yang efektif untuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan (*the lack of peaceful alternatives*).<sup>22</sup>

Myanmar memiliki empat pemicu tersebut. Negara ini telah mengalami konflik internal selama tujuh dekade, membuatnya sebagai negara di Asia Tenggara yang paling terimbas atas konflik nasional dan subnasional. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah total kematian yang telah terjadi di sana. Secara umum, konflik internal Myanmar dapat dibagi menjadi tiga bagian: insurgensi selama periode pascakemerdekaan di bawah pemerintahan parlementer (1948–1962), insurgensi selama pascakudeta pemerintahan sosialis (1962) di bawah pemerintahan Jenderal Ne Win dan Partai Program Sosialis Burma (1962–1988), dan insurgensi selama Pascaperang Dingin, pertama di bawah junta militer (1988–2011) dan kedua di bawah pemerintahan sipil sekarang.

Subbagian ini akan fokus mengelaborasi insurgensi selama Pascaperang Dingin. Sejarah tujuh dekade konflik menimbulkan dampak jangka-panjang bagi masyarakat: kekerasan hak asasi manusia berkepanjangan, kondisi tidak aman, kemiskinan, serta perasaan tidak berdaya yang dialami etnis minoritas. Keadaan ini kemudian diperburuk dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi serta justifikasi junta militer untuk tetap berkuasa di pemerintahan dalam jangka panjang.<sup>23</sup>

Sebagian besar konflik di Myanmar bersifat subnasional, konflik bersenjata yang memperebutkan kekuasaan atas teritori subnasional di dalam sebuah negara kedaulatan. Konflik ini biasanya antara pemerintah pusat dan aktor non-negara bersenjata yang mencari otonomi yang lebih besar bagi wilayah mereka. Konflik jenis ini sering terkonsentrasi di

<sup>22</sup> Ernie Regher, “Armed Conflict: Trends and Drivers” (Vancouver, 2013), [http://www.thesimonsfoundation.ca/sites/default/files/Armed Conflict - Trends and Drivers by Ernie Regehr\\_0.pdf](http://www.thesimonsfoundation.ca/sites/default/files/Armed%20Conflict%20-%20Trends%20and%20Drivers%20by%20Ernie%20Regehr_0.pdf).

<sup>23</sup> Adam Burke et al., “The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development” (San Fransisco: The Asia Foundation, 2017), <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/ContestedAreasMyanmarReport.pdf>.

perbatasan-perbatasan negara. Ketegangan dalam konflik subnasional ini biasanya terdapat dalam masyarakat etnis mayoritas di daerah tersebut, namun tergolong etnis minoritas di level nasional.<sup>24</sup>

Myanmar berbeda dalam banyak hal dari negara-negara lain yang juga mengalami konflik subnasional. Di sebagian besar negara Asia yang mengalami konflik subnasional, wilayah yang terkena dampak hanya sebagian kecil dari seluruh proporsi populasi nasional, rata-rata hanya 6.5 persen. Myanmar berbeda karena berdasarkan penelitian The Asia Foundation, konflik subnasional aktif atau laten terjadi paling tidak di 11 dari 14 *states* dan region. Cakupan wilayah ini setidaknya adalah rumah bagi 12.3 juta orang atau seperempat dari total penduduk di Myanmar, tersebar di 118 kota dari total 330 kota.<sup>25</sup> Perbedaan kedua, berbeda dengan mayoritas konflik nasional di negara-negara Asia Tenggara yang terjadi di negara yang relatif stabil dengan pendapatan menengah (*middle-income countries*), penduduk Myanmar sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan meskipun telah bertahun-tahun berada di pemerintahan otoriterisme. Karakteristik konflik subnasional Myanmar lainnya adalah banyaknya kelompok *ethnic armed organization* (EAO) yang aktif dan beberapa kelompok milisi bentukan pemerintah.

Di bawah pemerintahan National League for Democracy (NLD) dan *Tatmadaw* (tentara Myanmar) sekarang, mereka telah berulang kali menyatakan bahwa perdamaian adalah kunci menuju demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama EAO telah berupaya mencari solusi atas konflik subnasional. Delapan EAO telah menandatangani Nationwide Ceasefire Agreement (NCA), yang diinisiasi oleh pemerintahan transisi dan dialog-dialog politik yang dipimpin oleh NLD. Meskipun langkah ini dipuji oleh observer nasional dan internasional, kekerasan tetap terjadi di daerah-daerah konflik. Insiden ini tidak hanya mengorbankan proses transisi menuju perdamaian, namun juga tantangan bagi reformasi ekonomi dan politik

<sup>24</sup> Burke et al.

<sup>25</sup> Burke et al.

yang lebih luas.<sup>26</sup>

UCDP merekam 83 konflik bersenjata di Myanmar dalam rentang waktu tiga dekade, tersebar dalam 1.120 insiden kekerasan berbasis negara. Terdapat 18 kelompok lawan konflik dengan pemerintah Myanmar, yang tercatat di UCDP. Data ini menjadikan Myanmar sebagai negara dengan pengungsi tertinggi di Asia Tenggara.

**Tabel 2.** Kelompok yang Terlibat dan Jumlah Insiden Konflik Bersenjata di Myanmar, 1989–2018

Lokasi	Nama Kelompok	Jumlah Insiden
Rakhine State	The Arakan Army	22
Perbatasan	All Burma Students' Democratic Front	5
Rakhine State	Arakan Rohingya Salvation Army	24
Mon State	Beik Mon Army	1
Kayin State	Democratic Karen Buddhist Army – Brigade 5	31
Kayin State	God's Army	2
Kachin State	Kachin Independence Organization	234
Kayah State	Karenni National Progressive Party	64
Kayin State	Karen National Union	328
Shan State	Myanmar National Democratic Alliance Army	75
Shan State	Mong Tai Army	30
Mon State	New Mon State Party	9
Peren State	National Socialist Council of Nagaland – Khaplang faction	18
Shan State	Palaung State Liberation Front	89
Shan State	Restoration Council of Shan State	120
Rakhine State	Rohingya Solidarity Organisation	16
Shan State	Shan State Progress Party	42
Shan State	UWSA	10

Sumber: *Uppsala Conflict Data Program* versi 19.1 (telah diolah kembali oleh penulis)

<sup>26</sup> Burke et al.

Pascaperang Dunia II, Burma mengalami proses transisi dari masa pemerintahan Inggris. Burma meraih kemerdekaan negara pada 1948, namun tidak lama setelah itu negara ini jatuh pada masalah perang saudara. Hampir 90 persen penduduk Myanmar adalah Buddha Theravada, dan sebagian besar etnis mayoritas disebut sebagai Burman.<sup>27</sup> Inggris sering membenturkan etnis mayoritas ini kepada etnis-etnis minoritas seperti Chin, Kachin, Karin, dan Rohingya, menciptakan warisan kekerasan yang berlanjut hingga sekarang.<sup>28</sup>

Berbagai kelompok separatis kekiri dan konflik pecah antara pemerintah dan KNU di Kayin State. Konflik meluas hingga ke Shan State seiring dengan pertumbuhan personel dan kapasitas Tatmadaw. Pascakudeta 1962 yang dilancarkan oleh Jenderal Ne Win, dia membangun kekuatan pemerintahan militer sebagai justifikasi atas masalah-masalah yang mengancam negara sebagai sebuah kesatuan. Pemerintahan militer menganggap EAO sebagai *proxy* atas pemerintahan negara lain. Oleh karena itu, taktik dan operasi kontra-insurgensi dilancarkan secara brutal, menyebabkan permusuhan dan kebencian meningkat. Sejak 1968 junta militer dengan doktrin *Four Cuts* atau *Pya Ley Pya* mengakibatkan etnis-etnis yang memberontak ini terpaksa mengungsi ke wilayah yang berada di bawah pemerintah.<sup>29</sup> Strategi ini membuahkan hasil, pada akhir 1970-an, pemerintah mengambil alih wilayah-wilayah ini. Tatmadaw juga melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia seperti perusakan rumah-rumah, penggunaan tameng manusia, pemerasan pajak, serta kekerasan fisik dan seksual. Tatmadaw adalah kekuatan politik dominan di Myanmar selama 50 tahun.

<sup>27</sup> Matthew J. Walton dan Susan Hayward, "Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar," *Policy Studies* (Honolulu, 2014), <https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/ps071.pdf>.

<sup>28</sup> Juliane Schober, *Modern Buddhist Conjunctures in Myanmar: Cultural Narratives, Colonial Legacies, and Civil Society* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2011).

<sup>29</sup> Strategi Four Cuts atau Pya Ley Pya bertujuan menekan kelompok bersenjata dengan cara memotong akses uang, pangan, informasi, dan rekrutmen.

Pengalaman kekerasan dan ketidakadilan dalam hal ekonomi, sosial, politik berlarut-larut ini memperdalam duka (*grievances*) masyarakat yang terdampak konflik.<sup>30</sup>

Pemicu konflik di Myanmar memiliki kompleksitas karena terjadi di level nasional dan level lokal yang berbeda di masing-masing area. Dalam tataran nasional, selama dekade terakhir, pemerintah Myanmar kesulitan menentukan model politik yang harus dijalankan negara. Aung San Suu Kyi dan NLD menantang pimpinan militer dengan berkampanye serta menghasilkan penghapusan sistem yang dijalankan oleh militer, melaksanakan pemilu yang adil, dan membangun pemerintahan demokratis. Sementara di periode-periode sebelumnya, terdapat beragam faksi dan kelompok seperti Partai Komunis Burma, pihak-pihak yang terlibat dalam kudeta 1962, dan beberapa organisasi berbasis etnis.<sup>31</sup>

Meskipun sudah menjalankan reformasi sehingga berhasil merumuskan Konstitusi 2008 yang memberikan mandat kepada otoritas sipil, Tatmadaw masih menjadi kekuatan politik terkuat dan terbesar di Myanmar dengan menguasai tiga kementerian, 25 persen kursi parlemen nasional dan regional, dan otonomi dalam urusan-urusan pertahanan dan keamanan yang dijamin oleh konstitusi. Pengaruh Tatmadaw kuat khususnya di daerah-daerah terdampak konflik, di mana perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan militer kerap mendominasi peluang ekonomi lokal.<sup>32</sup>

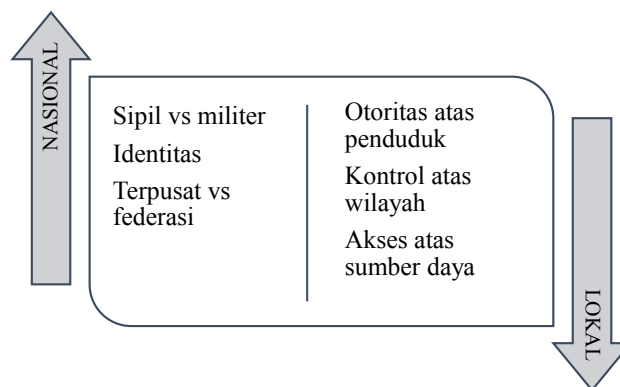
Dengan pengaruh kuat militer dalam pembuatan keputusan dan kebijakan negara, telah mempolarisasi posisi EAO dan Tatmadaw. Polarisasi ini tentunya akan mengorbankan upaya dan potensi perdamaian yang ada. EAO secara umum menginginkan sebuah serikat federasi di mana seluruh negara bagian (*states*) dianggap setara, serta memandang Tatmadaw sebagai ancaman bagi solidaritas dan kedaulatan bangsa.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Burke et al., "The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development."

<sup>31</sup> Burke et al., "The Contested Areas of Myanmar..."

<sup>32</sup> Burke et al., "The Contested Areas of Myanmar..."

<sup>33</sup> Pidato yang disampaikan oleh Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing dalam perayaan 1 tahun NCA. *Global New*



Sumber: The Asia Foundation, 2017 (telah diolah kembali oleh penulis)

**Gambar 9.** Kerangka Pemicu Konflik Subnasional di Myanmar

Konflik bersenjata di Myanmar dipicu oleh siklus berkepanjangan dari militerisasi dan konflik, diwarnai oleh sengketa atas sentralisasi kewenangan politik dan ekonomi. Dari sisi Tatmadaw, mereka menjustifikasi pendekatan perang dan tidak mau membagi kekuasaan (desentralisasi) atas militansi kelompok etnis dan aktivitas ekonomi terlarang yang Tatmadaw miliki. Di sisi lain, EAO menjustifikasi pemberontakan bersenjata sebagai basis melawan agresi Tatmadaw dan kuatnya sentralisasi kekuatan politik dan ekonomi Tatmadaw.<sup>34</sup>

Sebagian besar pemimpin EAO menerima bahwa wilayahnya adalah bagian dari Union of Myanmar, tetapi ingin mengusahakan sistem desentralisasi atau federal. Konflik berkepanjangan sejak merdeka hanya memberikan mereka sedikit otoritas atau suara.

Selain pengaruh kuat militer, hakikat atas identitas mereka juga menjadi salah satu pemicu. Myanmar memiliki 111 bahasa asli.<sup>35</sup> Keberagaman ini menjadi tantangan lain dalam mewujudkan perdamaian dan kohesi nasional.

Light of Myanmar, "Greetings of Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing at the first anniversary of the NCA," 2016, <https://www.globalnewlightofmyanmar.com/greetings-of-commander-in-chief-of-defence-services-senior-general-min-aung-hlaing-at-the-first-anniversary-of-the-nca/>.

<sup>34</sup> Burke et al., "The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development."

<sup>35</sup> David M. Eberhard, Gary F. Simons, dan Charles D. Fennig, "Ethnologue: Language of the World," SIL International (Dallas, TX, 2020), <http://www.ethnologue.com/country/MM>.

Karena identitas berhubungan erat dengan wilayah maka tidak heran bahwa pola pikir kewilayahan dijadikan landasan atas perebutan kekuatan politik serta klaim-klaim wilayah yang dianggap sebagai wilayah identitas tertentu. Situasi ini paling jelas di Rakhine, di mana banyak pemimpin etnis Rakhine menganggap pengakuan apa pun atas istilah 'Rohingya' sebagai ancaman terhadap klaim mereka sendiri untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Pemerintah tidak menganggap kelompok ini sebagai salah satu negara bagian Myanmar.<sup>36</sup> Seperti yang biasa terjadi dalam konflik subnasional, para pemimpin EAO memanfaatkan solidaritas etnis kepada penduduk setempat. Retorika para pemimpin ini biasanya disampaikan dalam bahasa nasionalis yang kuat dan menggunakan simbol-simbol identitas etnis seperti bahasa, bendera, atau budaya. Upaya pemerintah untuk memperluas peran negara—seperti di bidang pendidikan dan kesehatan—dapat membangkitkan semangat kelompok oposisi ini karena dianggap akan menggantikan identitas lokal.

Dinamika di tingkat lokal juga memicu konflik bersenjata oleh kelompok etnis di Myanmar. Kondisi di masyarakat dapat berbeda-beda dan dinamika konflik lokal sering melibatkan beragam kelompok. Selain tensi antara EAO dan Tatmadaw, banyak area yang dihuni oleh kelompok paramiliter bentukan Tatmadaw sebagai penjaga perbatasan dan milisi. Kelompok ini melaporkan dengan rutin serta menuruti kepentingan ekonomi dan politik

<sup>36</sup> Burke et al., "The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development."

Tatmadaw.<sup>37</sup>

Ada tiga hal yang menyebabkan tarik menarik antara Tatmadaw dan EAO di tingkat lokal, yaitu otoritas atas penduduk, kontrol atas wilayah, dan akses atas sumber daya. Dalam hal otoritas atas penduduk, Pemerintah Myanmar dan EAO sama-sama mencari otoritas atas penduduk setempat. Selain untuk mempertahankan pendapatan strategis, kedua pihak melihat tata kelola tumpang tindih nasional sebagai akibatnya. Selanjutnya, kontrol atas wilayah bertujuan memperkuat posisi militer dan mengonsolidasi otoritas. Bagi Tatmadaw, kontrol adalah bagian dari usaha jangka panjang mempertahankan keamanan internal dan mengelola perbatasan negara. Sementara EAO bertujuan untuk membangun pengaruh, mengumpulkan dana, dan membatasi ancaman keamanan dengan mengawasi wilayah dan penduduk yang mendiaminya. Aset wilayah sering dipertahankan mati-matian seperti jalan, bendungan, aliran listrik, dan perlintasan perbatasan. Terakhir, akses atas sumber daya juga mempengaruhi dinamika konflik lokal. Sumber daya alam dan kontrol atas rute-rute perdagangan menjadi sumber pemasukan bagi Tatmadaw. Sama halnya dengan Tatmadaw, EAO juga mendapatkan pemasukan dari pertambangan. Misalnya di Shan State dan daerah lain, EAO dituding berhubungan dengan produksi dan penyelundupan obat-obat terlarang.<sup>38</sup>

## Penutup

Tidak sejalan dengan tren global, data UCDP menunjukkan bahwa tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara masih didominasi oleh konflik berbasis negara/bersenjata dengan jumlah 186 konflik. Fakta ini menunjukkan bahwa di kawasan Asia Tenggara, negara masih menjadi pelaku kekerasan dengan berbagai

alasan. Jika melihat kasus Myanmar dengan beberapa dekade di bawah pemerintahan junta militer, negara bertanggung jawab atas gerakan-gerakan konflik subnasional yang berada di sebagian besar wilayah Myanmar. Jika ditarik garis tren linear, tren peningkatan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan (2019–2020). Sudah sepatutnya data statistik konflik ini direspons proporsional dan cermat oleh negara dan kawasan untuk melindungi warga negara serta mempertahankan perdamaian kawasan.

## Daftar Pustaka

- Abuza, Zachary. "In Organizational Shake-Up, IS Names New Province in Southeast Asia." *Benar News*, July 23, 2018. <https://www.benarnews.org/english/commentaries/asean-security-watch/is-province-07232018160808.html>.
- Burke, Adam, Nicola Williams, Patrick Barron, Kim Jolliffe, dan Thomas Carr. "The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development." San Fransisco: The Asia Foundation, 2017. <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/ContestedAreasMyanmarReport.pdf>.
- Eberhard, David M., Gary F. Simons, dan Charles D. Fennig. "Ethnologue: Language of the World." SIL International. Dallas, TX, 2020. <http://www.ethnologue.com/country/MM>.
- Eck, Kristine, dan Lisa Hultman. "Violence Against Civilians in War." *Journal of Peace Research* 44, no. 2 (2007): 233-246.
- Finnbogason, Daniel, dan Isak Svensson. "The Missing Jihad: Why Have There Been No Jihadist Civil Wars in Southeast Asia?" *The Pacific Review* 31, no. 1 (2017): 96–115.
- Fuller, Thomas. "Profits of Drug Trade Drive Economic Boom in Myanmar." *The New York Times*, 2015. <https://www.nytimes.com/2015/06/06/world/asia/profits-from-illicit-drug-trade-at-root-of-myanmars-boom.html>.
- Gleditsch, Nils Petter, Peter Wallensteen, Mikael Eriksson, Margareta Sollenberg, dan Håvard Strand. "Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset." *Journal of Peace Research* 39, no. 5 (2002): 615-637.

<sup>37</sup> Burke et al., *The Contested Areas of Myanmar...*

<sup>38</sup> Thomas Fuller, "Profits of Drug Trade Drive Economic Boom in Myanmar," *The New York Times*, 2015, <https://www.nytimes.com/2015/06/06/world/asia/profits-from-illicit-drug-trade-at-root-of-myanmars-boom.html>; Burke et al., "The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development."

- Global New Light of Myanmar. "Greetings of Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing at the first anniversary of the NCA," 2016. <https://www.globalnewlightofmyanmar.com/greetings-of-commander-in-chief-of-defence-services-senior-general-min-aung-hlaing-at-the-first-anniversary-of-the-nca/>.
- Högbladh, Stina. "UCDP GED Codebook version 19.1." Uppsala: Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2019.
- Mokhtar, Faris. "The Big Read: Battered in the Middle East, Islamic State Eyes Southeast Asia as Next Terrorism Hotspot." Channel News Asia, 2019. <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/islamic-state-terrorism-extremism-eyes-southeast-asia-11199586>.
- Pettersson, Therese, Stina Högbladh, dan Magnus Öberg. "Organized violence, 1989-2018 and peace agreements." *Journal of Peace Research* 56, no. 4 (2019): 589-603.
- Regher, Ernie. "Armed Conflict: Trends and Drivers." Vancouver, 2013. [http://www.thesimonsfoundation.ca/sites/default/files/Armed Conflict - Trends and Drivers by Ernie Regehr\\_0.pdf](http://www.thesimonsfoundation.ca/sites/default/files/Armed%20Conflict%20-%20Trends%20and%20Drivers%20by%20Ernie%20Regehr_0.pdf).
- Sarkees, Meredith Reid, dan Frank Wayman. *Resort to War: 1816–2007*. Washington D.C.: CQ Press, 2010.
- Schober, Juliane. *Modern Buddhist Conjunctures in Myanmar: Cultural Narratives, Colonial Legacies, and Civil Society*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2011.
- Sheikh, Mona Kanwal, ed. *Global Jihad in Southeast Asia: Examining The Expansion of The Islamic State and al-Qaeda*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2019.
- Sundberg, Ralph, Kristine Eck, dan Joakim Kreutz. "Introducing the UCDP Non-State Conflict Dataset." *Journal of Peace Research* 49, no. 2 (2012): 351-362.
- Sundberg, Ralph, dan Erik Melander. "Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset." *Journal of Peace Research* 50, no. 4 (2013): 523-532.
- Walton, Matthew J., dan Susan Hayward. "Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar." Policy Studies. Honolulu, 2014. <https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/ps071.pdf>.





**Jumlah Konflik Non-Negara, Berdasarkan Kelompok dan Lokasi (1989–2018)**

Total=23	Tahun																		Total													
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<i>Formally organized groups</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<i>Informally organized groups</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Informally ethnic/religious groups</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	12		
<b>Lokasi</b>																																
Kamboja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
Laos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malaysia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Myanmar	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11		
Filipina	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5		
Thailand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sumber: Uppsala Conflict Data Program (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

**Jumlah Kekerasan Sepihak, Berdasarkan Aktor dan Lokasi (1989–2018)**

Total=78	Tahun																					Total											
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Aktor</b>																																	
Negara	0	2	3	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	40	
Non-negara	0	2	1	1	1	1	2	1	0	1	0	2	1	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	0	1	1	38	
<b>Lokasi</b>																																	
Kamboja	0	1	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
Indonesia	0	2	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
Laos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Malaysia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Myanmar	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	0	26		
Filipina	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	14		
Thailand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	13		

Sumber: Uppsala Conflict Data Program (versi 19.1) (telah diolah kembali oleh penulis)

Apendiks 4

**Jumlah Insiden Kekerasan Terorganisasi, Berdasarkan Jenis (1989–2018)**

<b>Tahun</b>	<i>State-Based Conflict</i>	<i>Non-State Conflict</i>	<i>One-Sided Violence</i>	<b>Total</b>
1989	191	0	31	222
1990	177	4	54	235
1991	151	3	45	199
1992	98	0	38	136
1993	84	6	58	148
1994	125	4	73	202
1995	147	6	82	235
1996	138	7	66	211
1997	105	13	101	219
1998	72	8	137	217
1999	127	50	328	505
2000	263	33	210	506
2001	197	32	110	339
2002	433	12	133	578
2003	342	1	120	463
2004	497	12	198	707
2005	332	6	333	671
2006	304	6	386	696
2007	242	13	391	646
2008	272	1	200	473
2009	230	3	127	360
2010	188	0	136	324
2011	436	10	150	596
2012	228	12	90	330
2013	308	8	65	381
2014	215	2	41	258
2015	376	4	79	459
2016	202	0	72	274
2017	300	0	76	376
2018	180	0	31	211
<b>Total</b>	<b>6.960</b>	<b>256</b>	<b>3.961</b>	<b>11.177</b>

**Jumlah Insiden Kekerasan Terorganisasi, Berdasarkan Lokasi (1989–2018)**

<b>Tahun</b>	<b>Kamboja</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Laos</b>	<b>Malaysia</b>	<b>Myanmar</b>	<b>Filipina</b>	<b>Thailand</b>	<b>Total</b>
1989	43	5	1		33	135	5	222
1990	25	46	6		28	126	4	235
1991	18	38			29	113	1	199
1992	17	14			45	59	1	136
1993	82	8	1		10	45	2	148
1994	73	9			79	40	1	202
1995	100	21			89	18	7	235
1996	89	17			78	26	1	211
1997	50	37	1		88	40	3	219
1998	35	30			125	23	4	217
1999	1	326	1		128	48	1	505
2000	4	157	2		171	171	1	506
2001		99			91	146	3	339
2002		265	2		99	211	1	578
2003	1	226	3		64	153	16	463
2004		359	3		84	135	126	707
2005		33			80	124	434	671
2006		3	4		113	131	445	696
2007	1	1			174	103	367	646
2008	1	3			63	182	224	473
2009	1				35	155	169	360
2010					50	119	155	324
2011	3	4			263	149	177	596
2012	2	1			77	109	141	330
2013		6		14	86	139	136	381
2014		4			34	149	71	258
2015		3			199	203	54	459
2016					57	168	49	274
2017		3		1	80	265	27	376
2018		7			41	123	40	211
<b>Total</b>	<b>546</b>	<b>1.725</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>2.593</b>	<b>3.608</b>	<b>2.666</b>	<b>11.177</b>



## TENTANG PENULIS

### **M. Bahtiar Fajri**

Penulis merupakan alumnus Universitas Pertahanan yang saat ini sedang bekerja sebagai pengajar di Yayasan Darul Fikri Sidoarjo. Penulis dapat dihubungi melalui: 10020084024. fajri@gmail.com

### **Alfin Febrian Basundoro**

Penulis merupakan mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Tertarik dengan Studi Politik dan Keamanan Global sebagai fokus studinya, saat ini, penulis aktif dalam sejumlah organisasi mahasiswa berbasis *think-tank*, di antaranya Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) *chapter* Universitas Gadjah Mada dan Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner (UPII) Universitas Gadjah Mada. Penulis dapat dihubungi melalui surel: alfinfb@gmail.com.

### **Petrus Kanisius Siga Tage**

Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ners Universitas Citra Bangsa Kupang. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Manajemen Keperawatan, Filsafat Keperawatan, dan Metodologi Penelitian Kualitatif Keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui email: petruskanisiusigatage@ucb.ac.id

### **M. Hamdan Basyar**

Penulis merupakan Peneliti Ahli Utama pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Kajian utamanya adalah Agama dan Politik, Dunia Islam, dan Masalah Timur Tengah. Dia juga Dosen Pasca Sarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia (2002-sekarang).

Dia pernah meneliti berbagai masalah sosial, budaya, dan politik di berbagai tempat di Indonesia, hampir semua wilayah: dari Aceh sampai Papua.

Selain itu, dia juga pernah meneliti/seminar di luar negeri, yaitu: di Yordania (1995), Mesir (1995), Turki (1996), Belanda (1996), Inggris (1996), Singapore (2004), Malaysia (2004, 2014), Australia (2005), Iran (2008), Lebanon (2016), Arab Saudi (2017), Tunisia (2018), dan Qatar (2019). Penulis dapat dihubungi melalui email: hbasyar@gmail.com

### **Putri Ariza Kristimanta**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Meraih gelar S1 dari Universitas Indonesia dan S2 dari Universitas Pertahanan. Bergabung sebagai peneliti dalam Tim Reformasi Sektor Keamanan LIPI sejak 2018. Secara luas, memiliki minat kajian seputar studi perdamaian dan konflik. Penulis dapat dihubungi melalui email: putr018@lipi.go.id

### **Khanisa**

Peneliti Muda pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Memegang gelar S1 dari Universitas Gadjah Mada dan S2 dari Australian National University. Tergabung dalam Tim Kajian ASEAN P2P LIPI sejak 2011. Khanisa memiliki ketertarikan pada kajian Politik Internasional, Regionalisme dan Asia Tenggara. Penulis dapat dihubungi melalui email: khanisa.krisman@gmail.com

### **Lidya Christin Sinaga**

Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Meraih gelar S1 dari Universitas Gadjah Mada dan S2 dari Flinders University, Australia. Tergabung dalam Tim Kajian ASEAN P2P LIPI sejak 2008 dan Tim Kajian Etnik Tionghoa sejak 2018. Lidya memiliki ketertarikan pada kajian ASEAN, Hubungan Indonesia-Tiongkok, dan Etnik Tionghoa di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: lidya.bosua@gmail.com

### **Indriana Kartini**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Selain aktif tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI, penulis saat ini juga sedang menempuh Pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [indriana.kartini@gmail.com](mailto:indriana.kartini@gmail.com)

### **Defbry Margiansyah**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan sarjana dari program studi Hubungan Internasional di Universitas Pasundan dan magister dari Global Studies Programme di Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Minat kajian difokuskan pada tema dan isu seputar ekonomi politik global, teknologi, demokrasi, dan sosiologi politik internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: [defbry@yahoo.com](mailto:defbry@yahoo.com) / [defbry@gmail.com](mailto:defbry@gmail.com)

